

**SUMBER, AZAS DAN LANDASAN PENDIDIKAN**  
(Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap  
rumusan kebijakan pendidikan nasional)

Hamzah Junaid  
Jurusan Pendidikan Agama Islam  
DPK UIN Alauddin Makassar

**Abstrak**

*Pendidikan adalah sebuah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya, dan pendidikan juga merupakan proses membimbing, melatih, memandu manusia agar terhindar dari kebodohan dan pembodohan, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis dan intensif menuju kedewasaan individu, yang dilakukan secara kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir. Tugas dan fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas dan kompetitif. Selain itu, fungsi pendidikan harus menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik dimasa yang akan datang haruslah dengan ilmu pengetahuan. Secara teknis dan kelembagaan, pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga ia mampu mentransmisi pengetahuan yang diperolehnya dengan baik dan efektif. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.*

**Key words;** Sumber, azas dan landasan pendidikan

**A. Pendahuluan**

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh mutu SDM masyarakat bangsa tersebut, sedang mutu SDM tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing individu yang membentuk bangsa itu. Bangsa yang memiliki lembaga pendidikan yang visioner, dengan misi yang jelas akan menghasilkan keluaran yang bermutu. Disinilah pentingnya merumuskan sebuah wawasan pendidikan yang dilandasi aturan atau regulasi yang dapat memberikan ruang dan peluang terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Sasaran pendidikan secara makro sebagaimana yang terdapat dalam lembaga-lembaga pendidikan dapat diklassifikasi pada beberapa hal, anatara lain akuisisi pengetahuan (sasaran kognitif), pengembangan keterampilan/kemampuan (sasaran psikomotorik) dan pembentukan sikap (sasaran afektif), sasaran makro ini kemudian diterjemahkan kedalam berbagai bentuk sasaran mikro yang diukur secara terperinci dan spesifik berupa apa yang diharapkan dari hasil belajar mengajar.<sup>1</sup> Salah satu sasaran yang dapat diukur untuk sasaran kognitif adalah nilai hasil belajar dan perengkingan sebagai implikasi dari hasil belajar. Sasaran psikomotorik terkait dengan apa yang telah dihasilkan oleh peserta didik, sedang untuk sasaran afektif, terkait dengan perubahan sikap/prilaku peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.

Secara umum terdapat beberapa komponen utama dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu; murid, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, metode pembelajaran (dalam proses belajar mengajar) kurikulum pendidikan, alat instruksi dan alat penolong pendidikan, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan serta evaluasi pendidikan.<sup>2</sup> Oleh karena banyaknya komponen pendidikan yang harus dilaksanakan, maka pendidikan memerlukan adanya tata kelola dan manajemen pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang telah direncanakan, sehingga semua komponen pendidikan dapat digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana halnya system pendidikan nasional yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Gerakan pembaharuan di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk pembaharuan dalam sistem pendidikan. Salah satu tuntutan pembaharuan sistem pendidikan nasional adalah perlunya memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Secara khusus pendidikan nasional mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.<sup>4</sup> Dengan visi pendidikan tersebut, maka pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.<sup>5</sup>

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia bermutu tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaruan dan pemantapan system pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

6. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan system pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Mengembangkan mutu SDM sedini mungkin secara merata, terpadu, dan menyaluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolog, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local.<sup>6</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan dibidang pendidikan, baik dalam peraturan dan perundang-undangan maupun dalam perbaikan infrastruktur, sudah cukup menggembirakan dan dapat memberi penguatan terhadap asas dan landasan pendidikan nasional, demikian halnya dalam perbaikan manajemen pendidikan, yang dulunya diterapkan manajemen pendidikan sentralisasi yang ternyata kebijakan pemerintah ini menjadikan proses demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan kurang terdorong dan terakomodasi dalam pelaksanaan pendidikan nasional, sehingga dengan adanya reformasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia ikut memengaruhi system manajemen tersebut dari sentralisasi ( terpusat) ke desentralisasi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian pendidikan nasional.

Menurut Sunarya dalam Fuad Ihsan mengemukakan, bahwa pendidikan nasional adalah suatu system pendidikan yang berdiri diatas landasan dan dijiwai oleh

falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat ( 1, 2 ) dijelaskan;

1. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>8</sup>

3. Dalam GBHN 1988 ( BP 7 Pusat 1990) memberikan batasan pengertian tentang pendidikan nasional sebagai berikut; Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.<sup>9</sup>

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pendidikan nasional pada hekekatnya mengandung makna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif bagaimana menjadikan pendidikan itu dapat terlaksana secara merata dan meluas serta menyuluruh sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan itu lebih baik, bermutu dan lebih maju sejalan dengan ide-ide atau nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan termasuk dalam pengertian kualitatif adalah bagaimana mengembangkan pendidikan nasional agar menjadi suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan nasional hendaknya memiliki ciri-ciri sbb; *Pertama*, pendidikan nasional hendaknya memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan pengembangan iptek. *Kedua*; system pendidikan nasional hendaknya lebih kreatif dan inovatif, dengan tetap komitmen terhadap pondasional dan fungsionalnya sebagai landasan berpijak bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan nasional. *Ketiga* ; system pendidikan nasional hendaknya masalah-masalah operasional dan actual pendidikan untuk dijadikan sasaran terhadap dimensi-dimensi fondasional dan strukturalnya dan *Keempat*; pendidikan nasional hendaknya mengembangkan nuansa pemikiran konstruktif terhadap peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pendidikan nasional.

#### **B. Dasar, Tujuan dan fungsi Pendidikan.**

Setiap bangsa memiliki system pendidikan nasional, pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>10</sup>

Sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar system pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.<sup>11</sup>

Selain berdasarkan Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk membentuk manusia Pancasila, yaitu manusia Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, melalui system pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa.

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Sudah sangat jelas, bahwa tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya, sehingga segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan semata-mata ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan dianggap menyimpang dan tidak fungsional, bahkan harus dihindari atau dicegah terjadinya hal yang demikian.

Umar Tirtaraharja, menyatakan, bahwa tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan, oleh karena itu tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan normative, namun tidak bertentangan dengan hakekat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang positif, memang terkesan bahwa tujuan pendidikan tersebut bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas dan sulit ditransper kepada peserta didik, sehingga tujuan-tujuan pendidikan tersebut perlu dirinci menjadi tujuan khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan didalam praktek.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, secara epistemologis, pemikiran tentang tujuan pendidikan berkaitan langsung dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan dan metodologi pengembangannya agar dapat memudahkan peserta didik memahami bahan ajar yang disampaikan oleh para pendidik. Tujuan pendidikan dalam membentuk kepribadian siswa dapat dilihat dari kepribadian individu dan kepribadian social. Untuk itu dalam kaitannya dengan pemikiran yang mendasar

terhadap tujuan pendidikan, terdapat beberapa aspek penting yang diperhatikan yang berhubungan dengan siswa sebagai peserta didik yang menjadi obyek pendidikan, aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Aspek paedagogis, yaitu seluruh manusia memerlukan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang berjenjang harus terus dikembangkan kaulitasnya.
2. Aspek sosiologis, yaitu manfaat pendidikan bagi manusia dalam pergaulannya dengan sesama manusia.
3. Aspek filosofis, yaitu pengembangan cara berpikir anak didik yang diperkaya oleh kematangan dan teknik berpikir yang radikal, logis, kritis, dan sistematis, juga kontemplatif.
4. Aspek cultural, yaitu pengembangan ilmu pendidikan islam yang diterapkan kepada peserta didik guna membangkitkan kreativitasnya daya cipta dan karyanya dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasyarakat.
5. Aspek religiusitas, yaitu pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman, keyakinan, atau keimanan peserta didik sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta berkepribadian luhur dapat dicapai secara optimal.
6. Aspek pertumbuhan anak, yaitu perkembangan ilmu pendidikan islam berkaitan dengan pertumbuhan anak yang berdasarkan pada biologis anak, psikologis, dan didaktisnya.<sup>15</sup>

Abdul Mujib lebih jauh menjelaskan bahwa tujuan akhir pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam pribadi peserta didik. Tujuan akhir harus lengkap (*comprehensive*) mencakup semua aspek, serta terintegrasi dalam pola kepribadian ideal yang bulat dan utuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam segala aspeknya adalah aspek normative, aspek fungsional, dan psikotomorik.<sup>16</sup>

Secara akademik, pendidikan memiliki beberapa tujuan. **Pertama**, mengoptimalisasi potensi kognitif, afektif dan psikomotor yang dimiliki oleh peserta didik. **Kedua**, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi kegenerasi, untuk menghindari terputusnya anak bangsa dari akan budaya bangsanya. **Ketiga**, mengembangkan daya adaptalisasi siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah. **Keempat**, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. **Kelima**, mendorong siswa mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya. **Keenam**, mendorong dan membantu siswa memahami hubungan yang seimbang antara hokum dan kebebasan pribadi dan social. **Ketujuh**, mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, kemandirian hidup, kejujuran dalam bekerja dan integritas. **Kedelapan**, mendorong dan mengembangkan kemampuan siswa untuk melanjutkan studi, termasuk merangsang minat gemar belajar demi pengembangan pribadi. **Kesembilan**, mendorong dan mengembangkan dimensi fisik dan mental serta sikap disiplin bagi siswa untuk menghadapi dinamika kerja yang menuntut persyaratan fisik dan ketepatan waktu. **Kesepuluh**, mengembangkan proses berpikir secara teratur pada diri siswa. **Kesebelas**, mengembangkan kapasitas diri sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi pengemban amanah dimuka bumi ini.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan tujuan-tujuan pendidikan tersebut merupakan suatu kebulatan yang memberikan arah kepada ketercapain tujuan pendidikan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, namun yang paling penting adalah

proses pendidikan yang efektif dan optimal dalam memobilisasi segenap komponen pendidikan yang dikelola oleh para pendidik, sebab proses pendidikan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan, maka tugas dan fungsi yang perlu diimbang oleh lembaga pendidikan adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya. Ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, fungsi utama pendidikan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik dan menanamkan nilai-nilai yang baik.<sup>18</sup> Sudarwan Damin lebih memperjelas bahwa sesungguhnya fungsi pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif dan bermartabat.<sup>19</sup>

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pendidikan secara baik, hendaknya terlebih dahulu dipersiapkan situasi dan kondisi pendidikan yang bernuansa elastis, dinamis, dan kondusif yang memungkinkan bagi pencapaian fungsi tersebut. Hal ini berarti bahwa pendidikan dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya, baik secara struktural maupun institusional. Secara struktural, pendidikan menuntut adanya struktur organisasi yang mengatur jalannya proses pendidikan, baik pada dimensi vertikal maupun horizontal.

Sementara secara institusional, ia mengandung implikasi bahwa proses pendidikan yang berjalan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Untuk itu diperlukan kerjasama berbagai jalur dan jenis pendidikan mulai dari sistem pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.<sup>20</sup> Dengan demikian pendidikan berfungsi sebagai kunci pembuka jalan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berbagai ketrampilan, karena tanpa pendidikan, maka semua tidak akan terjadi. Ahamadi menambahkan tiga fungsi pendidikan :

1. Mengembangkan manusia subyek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca (analisis), akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas.

2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial lebih bermakna.

3. Membuka ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu maupun sosial.<sup>21</sup>

Secara umum fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik berinteraksi dalam berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia termasuk lingkungan sekitarnya ( fisik, social dan budaya ). Potensi yang dimiliki peserta didik akan mudah berkembang, jika proses interaksi dengan lingkungan pendidikan berkembang secara alamiah, oleh karena itu diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan pendidikan secara optimal dan penataan lingkungan pendidikan sedemikian rupa agar peluang pencapaian tujuan pendidikan dapat diperoleh secara optimal pula.

### **C. Landasan Pendidikan Nasional.**

Dalam pengembangan pendidikan diperlukan landasan-landasan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah, teknologi maupun etik relegius.

Salah satu problema pendidikan dalam pengembangannya adalah *foundational problems*, istilah ini diartikan sebagai alas, landasan sebagai dasar atau tumpuan. Pondasi sebagai alas atau pijakan berdirinya sesuatu hal memiliki dua sifat, ada yang bersifat material dan ada yang bersifat konseptual. Suyitno dalam Muhaimin mengemukakan bahwa pondasi/landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang( bangunan yang kokoh ), sedang pondasi/landasan pendidikan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu “ Pancasila dan UUD 1945, Sisdiknas, Peraturan Pemerintah tentang pendidikan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Dengan demikian pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan.<sup>23</sup> Selanjutnya landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan.

Landasan Pendidikan Nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Tuntutan tersebut sangat bergayut dengan aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basis kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional.

#### 1. Landasan Filosofis

Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.

Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. *Pertama*, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai:

- a. Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya.
- b. Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya.
- c. Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.<sup>24</sup>

*Kedua* pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat.

Kedua pandangan filosofis tersebut menjadikan pendidikan nasional harus ditanggung oleh semua pihak, sehingga pendidikan dibangun oleh semua unsur bangsa yang dapat berkontribusi terhadap unsur pranata sosial lainnya. Secara mendasar dapat ditegaskan bahwa landasan filosofis Pancasila dalam sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang khas dengan segala fitrahnya dan tugasnya menjadi agen pembangunan yang berharkat dan bermartabat.<sup>25</sup> Oleh karena itu landasan filosofis pendidikan nasional memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia hendaknya mengimplementasikan ke arah:

a. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi dan memelihara keutuhan bangsa dan negara.

b. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang proses pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai perbedaan individu lain, suku, ras, agama, status sosial, ekonomi dan golongan sebagai manifestasi rasa cinta tanah air. Dalam hal ini pendidikan nasional dipandang sebagai bagian dari upaya *nation character building* bagi bangsa Indonesia.

c. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi. Pendidikan hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga pendidikan untuk terbentuknya peserta didik menjadi warga yang memahami dan menerapkan prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip kerakyatan dan demokrasi harus tercermin dalam input-proses penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

d. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan menjamin pada penghapusan bentuk diskriminatif dan menjamin terlaksananya pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali.

e. Sistem pendidikan nasional yang menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, cinta tanah air dan memiliki tanggungjawab sosial yang berkeadilan. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar yang kokoh sekaligus ruh pendidikan nasional Indonesia.<sup>26</sup>

## 2. Landasan Sosiologis

Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi kegenerasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya.<sup>27</sup> Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi seperti itu, lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Dalam hal ini pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai pranata kemasyarakatan, pembudayaan masyarakat belajar (*society learning*) harus dijadikan sarana rekonstruksi sosial. Apabila perencanaan pendidikan yang melibatkan masyarakat bisa tercapai maka patologi sosial setidaknya berkurang. Hasrat masyarakat untuk belajar semakin meningkat.

Sistem pendidikan nasional hendaknya melibatkan berbagai elemen masyarakat, meskipun pemerintah telah menyiapkan dana khusus untuk pembangunan dibidang pendidikan, namun jika pendidikan akan ditingkatkan mutu atau kualitasnya, maka otomatis peran serta masyarakat sangat dibutuhkan bahkan menentukan. Demikian pula apabila pendidikan hanya terarah pada tujuan pembelajaran murni pada aspek kognitif, afektif tanpa mengaitkan dengan kepentingan sosial, politik dan upaya pemecahan problem bangsa, maka pendidikan tidak akan mampu dijadikan sebagai sarana rekonstruksi sosial.<sup>28</sup> Dalam kaitannya dengan perluasan fungsi pendidikan lebih jauh, maka diperlukan pengembangan sistem pendidikan nasional yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa dalam kerangka ikut memecahkan problem sosial. Masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah perbedaan sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban perbedaan tersebut. Aspek sosial lainnya seperti ketidaksamaan mengakses informasi yang konsekuensinya akan mempertajam kesenjangan sosial dapat dieleminir melalui pendidikan.

### **3. Landasan Kultural**

Landasan Pendidikan yang ketiga adalah Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung.<sup>29</sup>

### **4. Landasan Psikologis**

Landasan Pendidikan yang keempat adalah landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu hasil kajian dalam penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan, umpamanya pengetahuan tentang urutan perkembangan anak. Setiap individu memiliki bakat, minat, kemampuan, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda dengan yang lainnya.<sup>30</sup> Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.

### **5. Landasan Ilmiah dan Teknologi**

Landasan Pendidikan yang kelima adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain

pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan iptek harus segera diimplementasikan oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. Sebaliknya, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek (psikologi, sosiologi, antropologi, dsb). Seiring dengan kemajuan iptek, maka pada umumnya ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat.<sup>31</sup>

## 6. Landasan Yuridis

Landasan Pendidikan yang terakhir adalah Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>32</sup>

Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air.

Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan, bahkan dalam skala nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material tapi juga spiritual. <sup>33</sup>Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial tetapi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya di samping dasar regulasi sangat penting juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi.

### D. Asas-Asas Pokok Pendidikan Nasional.

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan.

Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Diantara asas tersebut, ada tiga asas yang diuraikan secara mendetail, yaitu; Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar.<sup>34</sup> Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.

### **1. Asas Tut Wuri Handayani**

Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam era kemerdekaan gagasan tersebut serta merta diterima sebagai salah satu asas pendidikan nasional Indonesia (Jurnal Pendidikan, No.2:24). Asas Tut Wuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud( sekarang Kementerian Pendidikan Nasional ), pada awalnya merupakan salah satu dari “**Asas 1922**” yakni tujuh buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa (didirikan 3 Juli 1922),<sup>35</sup> ketujuh asas Perguruan Nasional Taman Siswa yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi Pemerintah kolonial Belanda sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut “**Asas 1922**” adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum.
- b. Bahwa pengajaran harus member pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri.
- c. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri.
- d. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat.
- e. Bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri, dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin.
- f. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan.
- g. Bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak.<sup>36</sup>

Asas Tut wuri Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dari asasnya yang pertama ini dijelaskan bahwa tujuan asas Tut Wuri Handayani yaitu:

- a. pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan.
- b. pendidikan adalah penggulowenthah yang mengandung makna: *among*, *momong* dan *ngemong* (Karya Ki Hajar Dewantara, hal. 13). *Among* mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. *Momong* mempunyai arti mengamati-anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. *Ngemong* berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan,
- c. pendidikan menciptakan tertib dan damai (*orde en vrede*),
- d. pendidikan tidak *ngujo* (memanjakan anak), dan
- e. pendidikan menciptakan iklim, tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri (mandiri dalam diri anak didik). Semboyan lainnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari *tut wuri handayani*, padahakikatnya bertolak dari wawasan tentang anak yang sama, yakni tidak ada unsur perintah, paksaan atau hukuman, tidak ada campur tangan yang dapat mengurangi kebebasan anak untuk berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Dari sisi lain, pendidik setiap saat siap memberi uluran tangan apabila diperlukan oleh anak.<sup>37</sup>

Azas *Tut Wuri Handayani* ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono (filusof dan ahli bahasa) dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo*, *Ing Madyo Mangun Karso*.<sup>38</sup> Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, masing-masing sebagai berikut;

a. *Ing Ngarso Sung Tulodo* ( jika di depan memberi contoh) adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ia menempatkan pikiran / gagasan / pendapat para muridnya dalam cakrawala yang baru, yang lebih luas. Dalam posisi ini ia membimbing dan memberi teladan. Akhirnya, dengan filosofi semacam ini, siswa (dengan bantuan guru dan teman-temannya ) mengkonstruksi pengetahuannya sendiri di antara pengetahuan yang telah dikonstruksi oleh banyak orang termasuk oleh para ahli.

b. *Ing Madya Mangu Karsa* (di tengah membangkitkan kehendak) diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Dan, guru maju ke tengah-tengah (pemikiran) para muridnya. Dalam posisi ini ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal, lebih jelas, dan lebih banyak manfaatnya. Guru mungkin mengajukan pertanyaan, atau mungkin mengajukan gagasan/argumentasi tandingan. Mungkin juga ia mengikuti jalan pikiran siswa sampai pada suatu kesimpulan yang bisa benar atau bisa salah, dsb. Pendek kata, di tengah seorang guru menciptakan situasi yang membuat siswa berolah pikir secara kritis untuk menelaah buah pikirannya sendiri atau orang lain. Guru menciptakan situasi agar terjadi perubahan konsepsional dalam pikiran siswa-siswanya. Yang salah diganti yang benar, yang keliru diperbaiki, yang kurang tajam dipertajam, yang kurang lengkap dilengkapi, dan yang kurang masuk akal argumentasinya diperbaiki.

c. Tut Wuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan). Asas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri, dan ada kemungkinan melakukan kesalahan, tanpa ada tindakan (hukuman) pendidik.<sup>39</sup> Hal itu tidak menjadikan masalah, karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri, karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami peserta didik bersifat mendidik. Maksud tut wuri handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Implikasi dari penerapan asas ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

2) Seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal didalam mengaktualisasikan pengalaman belajar.

3) Peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa, sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar.

4) Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali, interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi serta merangsang berfikir siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber, kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi, tetapi tetap dibawah bimbingan guru.

Dalam kaitan penerapan asas Tut Wuri Handayani, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni:

1) peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan ketrampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat.

2) peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya.

3) peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri,

4) peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri.<sup>40</sup>

Ketiga asas tersebut sebagai semboyan dalam pendidikan merupakan satu kesatuan asas yang telah menjadi asas penting dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga mengandung makna mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan kehidupan lahir dan bathin menjadi subur dan selamat, dan perkembangan peserta didik harus senantiasa diikuti dengan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan,

## **2. Asas Belajar Sepanjang Hayat**

Asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup ( long life education). Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua

istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah “belajar” adalah perubahan perilaku (kognitif/afektif/psikomotor) yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedang istilah “pendidikan” menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien efektif, dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik.

Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup, dalam proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya dua hal pokok, yaitu; *pertama*; membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan *kedua*; meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat.

Ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu; *Pertama*, Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. *Kedua*, Dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia:

a. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya,

b. mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, non formal,

c. mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil Manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.<sup>41</sup>

Sesuai dengan uraian di atas, mengindikasikan bahwa pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana, kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang.

### **c. Asas Kemandirian Dalam Belajar.**

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktifitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut:

1. Belajar Mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar Mandiri mengintegrasikan self- management (manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan) dengan self-monitoring (siswa memonitor, mengevaluasi dan mengatur strategi belajarnya).

2. Peran kemauan dan motivasi dalam Belajar Mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa.

3. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya.<sup>42</sup>

Haris Mujiman dalam Joni Raka, T<sup>43</sup> mencoba memberikan pengertian belajar mandiri dengan lebih lengkap. Menurutnya belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Di sini belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator.

### **III. KESIMPULAN.**

1. Pendidikan adalah sebuah proses pemertabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya, dan pendidikan juga merupakan proses membimbing, melatih, memandu manusia agar terhindar dari kebodohan dan pembodohan, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis dan intensif menuju kedewasaan individu, yang dilakukan secara kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir.

2. Tugas dan fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas dan kompetitif. Selain itu, fungsi pendidikan harus menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik dimasa yang akan datang haruslah dengan ilmu pengetahuan. Secara teknis dan kelembagaan, pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga ia mampu mentransmisi pengetahuan yang diperolehnya dengan baik dan efektif.

3. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

4. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia, dan hasilnya tidak segera tampak, diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan, pada umumnya membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Kenyataan itu menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas-asas pendidikan sbb; landasan filosofis, sosiologis, cultural, psikologis, yuridis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Sedang asas-asasnya adalah; Asas tut wuri handayani, asas belajar sepanjang hayat dan asas kemandirian dalam belajar.

## Endnotes

---

<sup>1</sup> Lihat Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management, Analisis Teori dan Praktik* ( Cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 59.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 59.

<sup>3</sup> Yasir Arafat ( Penyusun ) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.* ( Permata Pres, tt) h.33

<sup>4</sup> Tiem Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.* ( Cet. 3, Bandung; Fokus Media, 2003) h.45.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.46.

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, at,al, *Op.Cit*, 64.

<sup>7</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan, Komponen MKDK* ( Cet.6 Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.114.

<sup>8</sup> Tiem Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, h. 3

<sup>9</sup> Umar Tirtarahardja dan S,L,La Solo, *Pengantar Pendidikan*, ( Cet. 2, Jakarta, PT. Rineka Cipta), 2008), h. 37.

<sup>10</sup> Tiem Redaksi Fokusmedia, *op. cit*, h. 6

<sup>11</sup> Fuad Ihsan, *op.cit*, h. 119

<sup>12</sup> Lihat Yasir Arafat ( Penyusun ), *op.cit*, h. 60.

<sup>13</sup> Tiem Redaksi Fokusmedia, *op. cit*, h. 7.

<sup>14</sup> Lihat Umar Tirtaraharja, *op. cit*, h. 37-38.

<sup>15</sup> Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, ( Cet. I, Bandung, Pustaka Setia, 2011) h. 70.

<sup>16</sup> Aspek normative yang ingin dicapai adalah norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasi; Aspek fungsional , sasarannya diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh. dan aspek operasional tujuan yang mempunyai sasaran teknis menejerial. lihat Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* ( Cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006) h. 75-77.

<sup>17</sup> Sudarwan Damin, *Pengantar Kependidikan, Landasan teori dan 234 Metefora Pendidikan* ( Cet. I, Bandung; Alfabeta, 2010 ) h. 41.

<sup>18</sup> lihat Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. I, Jakarta : Ciputat Pers, 2002 ), hlm..32

<sup>19</sup> **Beriman**; mengandung makna bahwa manusia mengakui adanya eksistensi Tuhan dan mengikuti ajaran dan menjauhi larangan-laranganNya. **Kecerdasan spiritual** yang dimiliki siswa terermin dari keimanan, ketaqwaan,akhlak mulia, budi pekerti luhur, altruis( semangat membantu orang lain secara Cuma-Cuma), motivasi tinggi, optimis dan kepribadian unggul. **Kecerdasan emosional**, tercermin dari sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni budaya, beraktualisasi diri melalui interaksi social, membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik, simpatik, menjunjung tinggi HAM, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan, berwawasan kebangsaan serta kesadaran akan hak dan kewajiban. **Kecerdasan intelektual**, tercermin dari kompetensi dan kemandirian dalam IPTEK , menjadi insane intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif. Cerdas secara kinestetik berkaitan dengan sosok pribadi sebagai insane yang sehat, bugar berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas atau cekatan, serta insane adiraga. **Kemampuan berkompetsi** tercermin dari kepribadian unggul dan gandrung keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri dan pantang menyerah, pembangun dan Pembina jejaring, bersemangat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif dan sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat.

---

**Bermartabat** mengandung makna memiliki harga diri, jati diri, dan integritas sebagai bangsa. Lihat Sudarwan Damin, *op.cit*, h. 46.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 33-34

<sup>21</sup> Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Cet. I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 33

<sup>22</sup> Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* ( Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 4.

<sup>23</sup> Lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 81.

<sup>24</sup> Rubino Rubiyanto, dkk, *Landasan Pendidikan*,( Cet. I, Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2003). H. 17. Dan lihat Reka Joni, T, *Penelitian Pengembangan dalam Pembaruan Pendidikan* ( Cet. I, Jakarta: P2LPTK Ditjen Depdikbud, 1984) h.45.

<sup>25</sup> Lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 92.

<sup>26</sup> Rubino Rubiyanto, dkk, *op.cit*, h. 19.

<sup>27</sup> Lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 96.

<sup>28</sup> Lihat *Ibid*, h. 98

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS.

<sup>30</sup> Lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 105.

<sup>31</sup> Lihat *ibid*, h. 113.

<sup>32</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>33</sup> Rubino Rubiyanto, dkk, *op.cit*, h. 27.

<sup>34</sup> Lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 117.

<sup>35</sup> Reka Joni, T, *Penelitian Pengembangan dalam Pembaruan Pendidikan* ( Cet. I, Jakarta: P2LPTK Ditjen Depdikbud, 1984) h.38. dan lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 118.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 119

<sup>37</sup> Rubino Rubiyanto, dkk, *op.cit*, h. 30.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 31, dan lihat Umar Tirtarahardja, *op. cit*, h. 118.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.32.

<sup>40</sup> *Ibid*, h.33.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.34. dan lihat <http://www.slideshare.net/widemulia/asas-pendidikan-di-indonesia>, di akses, tanggal, 25 Maret 2012,

<sup>42</sup> <http://www.slideshare.net/widemulia/asas-pendidikan-di-indonesia>, di akses, tanggal, 25 Maret 2012,

<sup>43</sup> Joni Raka, T, *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan dan pembaruan Pendidikan Guru* ( Malang; IKIP Malang, 1983 ) h. 58.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
- Arafat, Yasir ( Penyusun ) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*.  
Permata Pres, tt.
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Kependidikan, Landasan teori dan 234 Metefora Pendidikan*.  
Cet. I, Bandung; Alfabeta, 2010.
- Ekosusilo, Madyo dan R.B. Kasihadi, *Dasar-dasar Pendidikan*, Semarang: Effhar  
Publising.Cet. 2, 1993
- Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Cet. I, Bandung, Pustaka Setia, 2011.  
<http://www.slideshare.net/widemulia/asas-pendidikan-di-indonesia>, di akses,  
tanggal, 25 Maret, 2012
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Pendidikan, Komponen MKDK*. Cet.6 Jakarta: Rineka Cipta,  
2010.
- Joni Raka, T, *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan dan pembaruan Pendidikan  
Guru*. Malang; IKIP Malang, 1983.
- Penelitian Pengembangan dalam Pembaruan Pendidikan*.Cet. I, Jakarta: P2LPTK  
Ditjen Depdikbud, 1984.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet. I, Jakarta : Ciputat Pers, 2002.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*,  
Cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rubiyanto, Rubino, dan Eko supriyanto dan Joko Santoso, (2003). *Landasan  
Pendidikan*, Cet. I, Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2003.
- Tirtarahardja, Umar, dan S,L.La Solo, *Pengantar Pendidikan*, Cet. 2, Jakarta, PT. Rineka  
Cipta, 2008.
- Tiem Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003  
tentang Sistem pendidikan nasional*. Cet. 3, Bandung; Fokus Media, 2003.